

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA  
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN *LEVERAGE*  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KAB/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

**MUCHAMAD NADIM**

**NIM. 4317036**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2022**

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA  
PERIMBANGAN, BELANJA MODAL, DAN *LEVERAGE*  
TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH  
KAB/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH**

**SKRIPSI**

Diajukan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh  
gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.)



Oleh:

**MUCHAMAD NADIM**

**NIM. 4317036**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI SYARIAH  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**

**2022**

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA

Yang Bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muchamad Nadim  
NIM : 4317036  
Judul Skripsi : **Pengaruh Pendaatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini adalah benar-benar hasil karya penulis, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah penulis sebutkan sumbernya.

Demikian pernyataan ini penulis buat dengan sebenar-benarnya.

Pekalongan, 06 Desember 2022

Yang Menyatakan



**Muchamad Nadim**

**Nur Fani Arisnawati, M.M.**

---

**NOTA PEMBIMBING**

Lamp. : 2 (dua) eksemplar  
Hal : Naskah Skripsi  
Sdr. Muchamad Nadim

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam  
c/q. Ketua Jurusan Akuntansi Syariah  
di  
Pekalongan

*Assalamu'alaikum Wr. Wb*

Setelah diadakan penelitian dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan naskah Skripsi Saudara :

**Nama : Muchamad Nadim**

**NIM : 4317036**

**Judul Skripsi : Pengaruh Pendaatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah**

Dengan ini mohon agar Skripsi Saudara tersebut segera dimunaqosahkan.

Demikian nota pembimbing ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Atas perhatiannya, saya sampaikan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb*

Pekalongan, 21 November 2022  
Pembimbing,



**Nur Fani Arisnawati, M.M.**  
NIDN. 2019018801



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**  
**K.H. ABDURRAHMAN WAHID PEKALONGAN**  
**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**  
Jl. Pahlawan Rowolaku Kajen Pekalongan, Tlp. (0285) 412575, Fax. (0285) 423418  
Website : febi.uingusdur.ac.id Email : [febi.uingusdur.ac.id](mailto:febi.uingusdur.ac.id)

**PENGESAHAN**

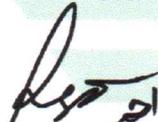
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan mengesahkan skripsi Saudara :

Nama : **Muchamad Nadim**  
NIM : **4317036**  
Judul : **Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah**

Telah diujikan pada hari Jum'at tanggal 22 Desember 2022 dan dinyatakan **LULUS** serta diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun.).

Dewan Penguji

Penguji I

  
**Ahmad Rosyid M.Si.**  
NIP. 197903312006041003

Penguji II

  
**Ina Mumtazah M.Ak.**  
NIP. 199203312019032007

Pekalongan, 10 Januari 2023

Disahkan oleh

Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam



  
**D.E. Sholihah Dewi Rismawati, S.H., M.H.**  
NIP. 19750220 199903 2 001

## **MOTTO**

*“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”*

(QS. Al-Baqarah ayat 286)

“Perbanyaklah mengingat Allah, karena itu adalah obat. Jangan buat dirimu terlalu banyak mengingat manusia, karena itu adalah penyakit”

-Abu Bakar Ash-Shiddiq-

“Jangan hanya menunggu waktu, tapi ciptakanlah waktumu sendiri”

-Muchamad Nadim-

## ABSTRAK

### **MUCHAMAD NADIM. Pengaruh Pendaatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Kasus Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah).**

Kinerja keuangan merupakan tolok ukur kinerja dengan berdasar pada indikator keuangan guna melihat apakah pemerintah daerah menjalankan pemerintahannya dengan baik dari hasil kegiatan operasionalnya. Beberapa faktor yang dapat memengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah mulai dari finansial maupun non-finansial. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh Pendaatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan *Leverage* terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah 2018-2020.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif yang menggunakan data sekunder berasal dari *website* resmi tiap DJPK Kemenkeu serta BPS. Pengambilan sampel menggunakan teknik *sampling* jenuh sehingga didapat 105 data masing – masing daerah. Jenis data yang digunakan yaitu data panel. Penelitian ini menggunakan metode analisis data uji regresi linear berganda dengan bantuan Eviews 10.

Hasil penelitian secara parsial menunjukkan bahwa variabel PAD dan Belanja Modal berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Variabel *Leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sedangkan variabel Dana Perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan *Leverage* berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah.

**Kata Kunci:** Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, Belanja Modal, Leverage, Kinerja Keuangan.

## **ABSTRACT**

**MUCHAMAD NADIM. *The Influence of Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds, Capital Expenditures, and Leverage on Regional Government Financial Performance (Case Study of Districts/Cities of Central Java Province).***

*Net The Influence of Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds, Capital Expenditures, and Leverage on Regional Government Financial Performance (Case Study of Districts/Cities of Central Java Province). Financial performance is a performance benchmark based on financial indicators to see whether local governments are running their administration well from the results of their operational activities. Several factors can affect the financial performance of local governments, ranging from financial and non-financial.*

*The purpose of this study is to determine the effect of Regional Original Revenue (PAD), Balancing Funds, Capital Expenditures, and Leverage on Regional Government Financial Performance in Districts/Cities of Central Java Province 2018-2020. This research is a type of quantitative research that uses secondary data from the official websites of each DJPK of the Ministry of Finance and BPS. Sampling used a purposive sampling technique so that 105 data were obtained from each area. The type of data used is panel data. This study used the data analysis method of multiple linear regression tests with the help of Eviews 10.*

*The results of the study partially show that the PAD and Capital Expenditure variables have a positive and significant effect on local government financial performance. Leverage variable has no effect on local government financial performance. Meanwhile, the Balancing Fund variable has a negative effect on local government financial performance. PAD, Balancing Funds, Capital Expenditure, and Leverage affect the financial performance of the regional government of the Regency/City of Central Java Province..*

*Keywords: Regional Original Income (PAD), Balance Fund, Capital Expenditure, Leverage, Financial Performance.*

## **KATA PENGANTAR**

Puji syukur saya ucapkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya saya dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulisan skripsi ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Akuntansi Jurusan Akuntansi Syariah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan. Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan skripsi ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan skripsi ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. Zaenal Mustakim, M.Ag. selaku Rektor UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
2. Dr. Hj. Shinta Dewi Rismawati, SH., MH. selaku Dekan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
3. Dr. Tamamudin, M.M. selaku Wakil Dekan bidang Akademik dan Kelembagaan FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
4. Ade Gunawan M.M selaku Ketua Jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
5. Ria Anisatus Sholihah, S.E., Ak., MSA, CA selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi Syariah FEBI UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan
6. Nur Fani Arisnawati, M.M selaku dosen pembimbing yang telah menyediakan waktu, tenaga, dan pikiran untuk mengarahkan saya dalam penyusunan skripsi ini

7. Ahmad Rosyid M.Si selaku Dosen Penasehat Akademik (DPA)

Akhir kata, saya berharap Tuhan Yang Maha Esa berkenan membalas segala kebaikan semua pihak yang telah membantu.

Pekalongan, 06 Desember 2022

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials 'MN' with a long horizontal stroke underneath.

Muchamad Nadim

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL...</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA .....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iv</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>vii</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xi</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL.....</b>	<b>xvi</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xvii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xviii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah .....	8
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat Penelitian.....	10
E. Sistematika Penulisan.....	10
<b>BAB II LANDASAN TEORI</b>	
A. Landasan Teori.....	12
B. Telaah Pustaka .....	26
C. Kerangka Berfikir .....	32
D. Hipotesis Penelitian .....	33
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian.....	38
B. Setting Penelitian .....	38
C. Populasi dan Sampel .....	38
D. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	39

E. Sumber Data.....	41
F. Teknik Pengumpulan Data.....	41
G. Teknik Pengolahan dan Analisis Data .....	42
<b>BAB IV HASIL ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Objek Penelitian .....	50
B. Hasil dan Analisis Data.....	51
C. Pembahasan Hipotesis .....	61
<b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	66
B. Keterbatasan Penelitian.....	67
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>68</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
1. Lampiran 1 Daftar Daerah Kabupaten dan Kota Populasi Penelitian.....	II
2. Lampiran 2 Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.....	III
3. Lampiran 3 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah.....	VI
4. Lampiran 4 Data Leverage (Total Utang/Total Ekuitas) Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah .....	XI
5. Lampiran 5 Hasil Uji Chow .....	XV
6. Lampiran 6 Hasil Uji Hausman .....	XV
7. Lampiran 7 Hasil Uji LM .....	XVI
8. Lampiran 8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	XVI
9. Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinearitas .....	XVII
10. Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	XVII
11. Lampiran 11 Hasil Uji Model Regresi (Model FEM) .....	XVIII
12. Lampiran 12 Surat Hasil Similarity Checking.....	XIX

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi kata-kata arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No.158/1997 dan No.0543 b/U/1987.

### A. Konsonan Tunggal

Huruf arab	Nama	Huruf latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ĥa	ĥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	kadan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	esdan ye
ص	Šad	š	es (dengan titik di bawah)
ض	Ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	komaterbalik (di atas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em

ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha

## B. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia yang terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

### 1. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	<i>Fathah</i>	A	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I	I
◌ُ	<i>Dhammah</i>	U	U

### 2. Vokal Rangkap

Vokal rangkap dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
...يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	a dan i
...وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh :

كَتَبَ *Kataba*

كَيْفَ *Kaiifa*

هَوَّلَ *Haula*

## C. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harkat* dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
------------------	------	-----------------	------

... اِ ...	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	A	a dan garis di atas
... يِ ...	<i>Kasrah dan ya</i>	I	i dan garis di atas
... وُ ...	<i>Hammah dan wau</i>	U	u dan garis di atas

Contoh :

قَالَ *qāla*

قِيلَ *qīla*

#### D. *Ta'marbutah*

Transliterasi untuk *ta'marbutah* ada dua:

1. *Ta'marbutah* hidup

*Ta'marbutah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah “t”.

2. *Ta'marbutah* mati

*Ta'marbutah* yang mati atau mendapat harakat *sukun*, transliterasinya adalah “h”.

3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta'marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al* serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta'marbutah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh :

طَلْحَةٌ *talḥah*

#### E. *Syaddah*

*Syaddah* atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا *rabbanā*

نَزَّلَ *nazzala*

## F. Kata Sandang

Kata sandang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu ال namun dalam transliterasi ini kata sandang itu di bedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyah* ditransliterasikan dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

3. Baik diikuti huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُولُ *ar-rajulu*

القَلَمُ *al-qalamu*

## G. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan diakhir kata. Bila *hamzah* itu terletak diawal kata, isi dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh :

النَّوْءُ *an-nau'*

إِنَّ *inna*

## H. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *harf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau *harakat* yang

dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

إِبْرَاهِيمُ الْخَلِيلِ     *Ibrāhīm al-Khalīl*  
*Ibrāhīmūl-Khalīl*

### I. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ     *Alhamdulillahirabbil al-‘ālamīn*

Penggunaan huruf awal kapital hanya untuk Allah bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau tulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf capital tidak digunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ     *Naṣrunminallāhiwafathunqarīb*

### J. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu di sertai dengan pedoman Tajwid.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal .....	6
Tabel 1.2 Data Leverage Pemda Jawa Tengah .....	7
Tabel 2.1 Kajian Riset Terdahulu .....	27
Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel.....	39
Tabel 4.1 Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah .....	50
Tabel 4.2 Hasil Pengujian Statistik Kinerja Keuangan .....	52
Tabel 4.3 Hasil Pengujian Statistik PAD .....	52
Tabel 4.4 Hasil Pengujian Statistik Dana Perimbangan.....	53
Tabel 4.5 Hasil Pengujian Statistik Belanja Modal .....	53
Tabel 4.6 Hasil Pengujian Statistik <i>Leverage</i> .....	54
Tabel 4.7 Hasil Uji Multikolinearitas.....	54
Tabel 4.8 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	55
Tabel 4.9 Hasil Uji Model Regresi Data Panel .....	56
Tabel 4.10 Hasil Uji Regresi Linear Berganda Model FEM .....	57

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2. 1 Kerangka berfikir .....	32
-------------------------------------	----

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Daftar Daerah Kabupaten dan Kota Populasi Penelitian .....	II
Lampiran 2 Data Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah .....	III
Lampiran 3 Data Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Belanja Modal Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah .....	VI
Lampiran 4 Data Leverage (Total Utang/Total Ekuitas) Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah .....	XI
Lampiran 5 Hasil Uji Chow .....	XV
Lampiran 6 Hasil Uji Hausman .....	XV
Lampiran 7 Hasil Uji LM .....	XVI
Lampiran 8 Hasil Analisis Statistik Deskriptif .....	XVI
Lampiran 9 Hasil Uji Multikolinearitas .....	XVII
Lampiran 10 Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	XVII
Lampiran 11 Hasil Uji Model Regresi (Model FEM) .....	XVIII
Lampiran 12 Surat Hasil Similarity Checking .....	XIX

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Dalam melaksanakan kegiatan ekonominya, seluruh pemerintah daerah diberikan hal secara mandiri dalam pengelolaannya, keadaan tersebut disebabkan karena indonesia menjadi negara yang mendukung asas desentralisasi dengan diberlakukannya otonomi daerah yang secara resmi diterapkan 20 tahun silam tepatnya pada tahun 2001. Skema lama yang digunakan dalam menyelenggarakan sistem pemerintahan saat ini tidak lagi sesuai jika menilik tatanan masyarakat yang berubah seiring perkembangan jaman, terlebih lagi setelah disahkannya UU no 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah serta UU no 33 tahun 2004 tentang perimbangan keuangan pemerintah pusat dan daerah.

Dengan diberlakukannya undang - undang diatas pada hakekatnya bisa menjadikan kebebasan pemerintah daerah untuk menjalankan semua urusan pemerintahannya secara mandiri, serta memberikan kesempatan kepada pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan segala potensi kekayaan yang dimiliki daerahnya masing - masing, seperti berupa kekayaan sumber daya manusia ataupun kekayaan sumber daya alam didaerah tersebut dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan mendukung pelaksanaan pembangunan nasional. Seiring diterapkannya otonomi daerah, pandangan terhadap pengelolaan keuangan daerah di setiap tingkatan provinsi hingga kabupaten/kota serta desa telah mengalami perubahan yang cukup signifikan.

Sehingga penting bagi setiap pemerintah daerah agar memperhatikan lebih dalam atas kinerja pengelolaan keuangan daerah. Karena jika pengelolaan tersebut dilakukan secara ekonomis, efektif serta efisien atau mencakup prinsip keadilan, akuntabilitas dan transparansi maka hal tersebut dapat menyongsong perkembangan ekonomi hingga terciptanya kemandirian setiap daerah itu sendiri. (B. I. Sari & Halmawati, 2021)

Pada era otonomi daerah keberhasilan suatu sistem pemerintahan saat ini pada dasarnya dapat diukur dari berbagai pencapaian kinerja pemerintah tersebut, salah satunya yaitu kinerja anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD). Pada entitas pemerintah, anggaran mempunyai peran besar dalam pelaksanaan sistem pemerintahan yang sehat. Anggaran sangat berperan dalam pengendalian organisasi, perencanaan, alokasi sumber daya, distribusi, hingga penilaian kinerja. (Andirfa, 2018) Dalam melihat sejauh mana pemerintah telah menjalankan tujuannya dalam menerapkan aturan pengelolaan keuangan dengan baik dan benar maka kinerja keuangan dapat menjadi alat analisis yang tepat. Hal tersebut dinilai penting sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan yang lebih tinggi sebagai tuntutan yang seharusnya dipenuhi oleh setiap entitas sehingga akan menarik minat pihak eksternal dapat membuat keputusan untuk menginvestasikan dananya didalam daerah tersebut.

Untuk memastikan sejauh mana pemerintah daerah dapat melaksanakan kegiatan keuangannya secara baik sesuai dengan aturan yang telah diterapkan maka dapat digunakan kinerja keuangan sebagai ukuran yang tepat hal tersebut dilakukan sebagai upaya pemerintah daerah untuk

meningkatkan kualitas pelayanan untuk memenuhi tuntutan pihak eksternal yang akan berinvestasi kedalam pemerintah daerah tersebut.

Dapat dikatakan bahwa kinerja keuangan menjadi salah satu unsur penting bagi berbagai pihak yang berkepentingan baik itu pihak eksternal maupun pemerintah daerah itu sendiri. Dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang lebih baik maka diperlukan pengembangan program yang akan dilakukan pemerintah daerah selanjutnya, untuk membantu merealisasikan hal tersebut maka dapat melihat data pengukuran kinerja keuangan berdasarkan informasi financial yang dapat diukur melalui anggaran yang dibuat pada periode sebelumnya.

Kinerja keuangan tersebut pada dasarnya dapat diukur pula berdasarkan kemampuan pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi yang terdapat dalam daerah terkait sehingga bisa memberi dampak positif terhadap perkembangan PAD setiap periode. Pendapatan asli daerah (PAD) yang mana pada dasarnya yaitu pendapatan serta belanja daerah merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mengembangkan pertumbuhan ekonomi daerah. PAD yang dimiliki pemerintah daerah diharapkan mampu menjadi tumpuan agar tercukupi nya kebutuhan pembangunan serta pembiayaan dari hasil kerja pemerintah daerah dalam meningkatkan sumber keuangan daerah. Pada dasarnya kesuksesan diselenggarakannya otonomi daerah bisa diukur dari instrumen pendapatan asli daerah yang dimilikinya, akan tetapi dana alokasi dari pemerintah pusat masih menjadi ketergantungan bagi sebagian besar pemerintah daerah.(Salsabilla & Rahayu, 2021)

Dalam pelaksanaan desentralisasi fiskal dan otonomi daerah kemandirian menjadi salah satu bahasan yang setiap pemerintah daerah hadapai. Hal tersebut dikarenakan kesenjangan fiskal (fiscal gap) akan terjadi bilamana terdapat ketidak seimbang antara antaran kapasitas yang dimiliki daerah (fiscal capacity) dengan kebutuhan daerahnya (fiskal need). Maka dari itu pemerintah daerah dituntut agar dapat meningkatkan PAD dengan tidak melewati batas aturan dengan mengoptimalkan potensi yang dimiliki daerah tersebut. Dalam meningkatkan PAD dari segi penerimaan harus diikuti dengan adanya pengeluaran yang sesuai serta dikelola dengan cermat menggunakan prinsip value for money yang dikerjakan secara menyeluruh meliputi berbagai strategi pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan yang ada dan diiringi dengan ditingkatkan nya pengendalian internal pemerintah sehingga dapat terpenuhinya prinsip accountability dan agency.

Kapasitas suatu pemerintahan dalam mengolah keuangannya dapat dicerminkan lewat APBD dimana dapat menunjukkan seberapa besar upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah nya oleh pemerintah sehingga dapat membiyai pembangunan daerah beserta pelayanan publik yang diberikan. (Mulyani & Wibowo, 2017) Kualitas pelayanan tersbut dapat meningkat apabila PAD dapat dikelola dengan baik disisi lain alokasi belanja modal dapat ditingkatkan pula. Namun kenyataannya dengan adanya peningkatan PAD tersebut pengalokasian yang dilakukan oleh pemerintah cenderung lebih banyak ke biaya lain - lain dan tidak diikuti oleh alokasi

terhadap anggaran belanja modal yang berperan penting dalam peningkatan kualitas pelayanan entitas terkait.

Selain PAD, unsur lain juga menjadi esensi primer yang berkontribusi besar dalam susunan APBD yaitu dana perimbangan. Telah dijelaskan dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 bahwa Dana Perimbangan merupakan dana perolehan dari APBD dimana disalurkan pada pemerintah daerah guna pelaksanaan otonomi daerah. Dengan adanya penyaluran dana oleh pemerintahan pusat pada pemerintahan daerah merupakan momentum yang tepat untuk pemerintah daerah dapat memaksimalkan aktivitas belanja modal guna pembangunan dalam berbagai aspek (Nugroho, 2018). Maka akan semakin besar harapan meningkatnya kinerja keuangan pemerintah daerah apabila penegelolaan keuangan daerah tersebut dilakukan dengan baik sesuai dengan kaidah yang ada.

Agar upaya meningkatkan sumber pendapatannya pemerintah daerah telah melakukan berbagai tindakan dengan aktivitas belanja modal seperti pembangunan infrastruktur yang secara tidak langsung akan berdampak pada APBD. Belanja modal pemerintah sendiri merupakan dana yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah pada proyek - proyek investasi tertentu guna memajukan serta meningkatkan kenyamanan dan kemudahan bagi masyarakat untuk jangka panjang, yang lebih dari 1 tahun pada umumnya. Pengalokasian belanja modal biasanya diprioritaskan untuk kebutuhan setiap daerah terkait sarana dan prasarana, seperti halnya ditujukan untuk keberlangsungan kegiatan

pemerintahan ataupun fasilitas umum yang mana memudahkan masyarakatnya.(Wiraswasta et al., 2018).

Tabel 1.1 Data PAD, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Pemerintah Daerah

Jawa Tengah			
	2018	2019	2020
<b>PAD (Juta rupiah)</b>	13 711 837	14 437 915	13 669 303
<b>Dana Perimbangan (Juta rupiah)</b>	10 933 776	11 334 903	11 632 689
<b>Belanja Modal</b>	2 203 623 420	9 625 498 405	1 249 404 700

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/statictable>

Jika kita perhatikan tabel tersebut menunjukkan apabila proporsi antara PAD dengan dana perimbangan jika dikalkulasikan dapat dikatakan jika perbandingannya tidak terlalu besar sehingga ketertantungan terhadap pemerintah pusat dari pemerintah daerah dinilai masih cukup tinggi.

Perhitungan rasio leverage dalam pemerintah daerah juga menjadi penting sebagai dasar perhitungan kreditor maupun calon kreditor dalam hal mengambil keputusan penempatan kredit atau investasi. Leverage sendiri berhubungan dengan penggunaan aktiva dimana dalam penggunaannya pemerintah daerah dituntut untuk menutup beban tetap atau biaya tetap. Leverage disini sebagai proporsi yang mencerminkan perbandingan antara besaran utang yang dimiliki dari pihak eksternal dengan aktiva pribadi atau acap kali disebut Debt Equity Ratio (DER).

Tabel 1.2 Data Leverage Pemerintah Daerah Jawa Tengah 2018 - 2020

	2018	2019	2020
Kewajiban	653 661 482	686 226 549	687 827 421
Ekuitas	154 188 756 137	153 820 449 693	153 544 663 617
<b>Leverage (DER)</b>	0,004	0,0045	0,0045

Sumber : <https://jateng.bps.go.id/menu/13/keuangan>

Dari data diatas dapat dilihat bawah leverage pemerintah daerah jawa tengah mengalami kenaikan setiap tahunnya, leverage yang merupakan faktor finansial yang mempengaruhi kinerja keuangan pemerintah daerah mengartikan bahwa kian besar kepemilikan tingkat leveragenya akan kian ketat pula pengawasan pihak dari pihak ketiga (kreditor) sebagai jaminan atas dana yang dipinjamkan. Ketatnya pengawasan tersebut dapat membuat pemerintah untuk semakin berupaya dalam meningkatkan kinerja keuangan yang dimilikinya.(Dewata et al., 2017)

Mengutip dari pernyataan Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menyampaikan pengarahan dalam Sosialisasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2019 di Jakarta, beliau menyampaikan bahwa dana transfer daerah / dana perimbangan yang selama ini dialokasikan melalui APBD tidak banyak membantu dalam percepatan pembangunan sebab sebagian besar dana itu habis untuk belanja pegawai ketimbang belanja modal. Selanjutnya beliau mencontohkan ada daerah yang menghabiskan 35-60% dari dana transfer umum untuk belanja pegawai, sedangkan untuk pembangunan infrastruktur rata-rata hanya mencapai porsi 19% saja, padahal sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 disebutkan bahwa pemerintah pusat mewajibkan

pemda untuk mengalokasikan minimal 25% dari dana transfer umum untuk pembangunan infrastruktur.

Kinerja keuangan sendiri merupakan suatu tolak ukur bagaimana kondisi internal pemerintah daerah dalam sudut pandang keuangan yang meliputi pendapatan dan belanja daerah, sehingga kinerja keuangan dapat tercermin dari efisiensi belanja serta peningkatan pendapatan daerah. Namun pada praktiknya belanja modal yang dialokasikan untuk pembangunan daerah tidak lebih besar dari apa yang diharapkan melainkan jauh lebih kecil jika kita bandingkan dengan belanja operasi. Karena kurangnya atensi pemerintahan daerah dalam menggali besarnya kekuatan daerah tersebut dalam menghasilkan PAD bisa jadi menjadi faktor utama mengapa masalah belanja modal masih relatif kecil. Selain itu, pendapatan asli daerah kab/kota di Provinsi Jawa Tengah memang masih memiliki ketergantungan pada pemerintah pusat dikarenakan pendapatan dari dana perimbangan cenderung lebih besar dibandingkan pendapatan asli daerah.

## **B. Rumusan Masalah**

Rumusan masalah yang bisa dijabarkan dari paparan latar belakang tersebut sebagai berikut :

1. Apakah pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Apakah dana perimbangan berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

3. Apakah belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Apakah leverage berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah
5. Apakah pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, leverage, dan belanja modal berpengaruh signifikan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

### **C. Tujuan Penelitian**

Peneliti menjalankan riset ini dengan tujuan sebagai berikut:

1. Menunjukkan Mengetahui pengaruh parsial pendapatan asli daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
2. Mengetahui pengaruh parsial dana perimbangan terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
3. Mengetahui pengaruh parsial belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
4. Mengetahui pengaruh parsial leverage terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?
5. Mengetahui pengaruh simultan pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan, leverage, dan belanja modal terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah?

## **D. Manfaat Penelitian**

### 1. Manfaat Praktis

#### a. Bagi Mahasiswa

Menelaah tentang apa – apa saja yang dapat mempengaruhi kinerja keuangan.

#### b. Bagi Universitas

Agar dapat dijadikan referensi atau khasanan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan dengan pengetahuan ekonomi

#### c. Bagi peneliti lainnya

Dapat dijadikan referensi penelitian serta bahan tinjauan dan pertimbangan.

### 2. Manfaat teoritis

Dalam pengerjaannya penulis berharap tulisan ini dapat menjadi referensi para akademisi maupun peneliti setelah ini guna membuat riset dengan judul berkaitan di kemudian hari.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan riset ini akan dibagi kedalam lima bab. Berikut ini penjelasan dari setiap bab dalam riset ini:

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini akan memaparkan urain latar belakang yang nantinya menjadi tolok ukur menyusun rumusan masalah serta tujuan riset.

## BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini akan menjelaskan mengenai teori dan juga variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian. Teori tersebut menjadi landasan dalam menganalisis permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

## BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Metode penelitian mencakup populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan, definisi dan pengukuran variabel, serta hipotesis operasional

## BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai hasil penelitian berdasarkan analisis data serta pembahasan yang terkait dengan hasil analisis penelitian.

## BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Pada bagian penutup berisikan penarikan simpulan dari penelitian yang telah dilakukan, keterbatasan penelitian, implikasi praktis dan teoritis dari riset ini.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Setelah dilakukan beberapa proses analisis data dan pembahasan pada bab sebelumnya, maka diambil kesimpulan antara lain :

1. Secara parsial atau individual variabel PAD berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Kab/Kota Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal tersebut terjadi karena jika pemerintah mengelola PAD nya secara optimal akan meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.
2. Secara parsial atau individual variabel Dana Perimbangan tidak berpengaruh positif/ memiliki pengaruh negatif terhadap Kinerja Keuangan Kab/Kota Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hasil ini dikarenakan dana perimbangan justru membuat pemerintah daerah menjadi ketergantungan terhadap dana dari pemerintah pusat.
3. Secara parsial atau individual variabel Belanja Modal berpengaruh positif terhadap Kinerja Keuangan Kab/Kota Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini karena belanja modal jika dialokasikan dengan baik dapat digunakan sebagai penopang yang dapat menghasilkan sumber pendapatan pemerintah daerah yang baru.
4. Secara parsial atau individual variabel Leverage tidak berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Kab/Kota Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah. Hal ini disebabkan karena sebagian besar kab/kota yang terdapat di Provinsi Jawa Tengah sudah memiliki modal yang cukup besar dalam memdanai

kebutuhan operasionalnya, sehingga tidak terlalu memerlukan kucuran dari pihak eksternal.

5. Secara simultan atau bersama-sama variabel PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, dan Leverage berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Kab/Kota Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **B. Keterbatasan Penelitian**

Terdapat sejumlah keterbatasan pada riset ini, diantaranya yaitu:

1. Variabel yang digunakan pada riset ini memiliki keterbatasan 4 variabel saja yaitu PAD, Dana Perimbangan, Belanja Modal, serta Leverage. Sementara itu, variabel lainnya terdapat dugaan bisa memiliki pengaruh pada kinerja keuangan pemerintah daerah selain disebutkan diatas masih banyak seperti Ukuran Pemda, Karakteristik Pemda, Pengelolaan Keuangan serta faktor-faktor lain.
2. Sample pada penelitian juga terbatas dalam lingkup Kab/Kota Provinsi Jawa Tengah dengan kurun waktu 2018-2020 sehingga masih banyak objek serta periode yang belum diteliti.

## DAFTAR PUSTAKA

- Afrian, G., Surya, R., & Silfi, A. (2017). PENGARUH KARAKTERISTIK PEMERINTAH DAERAH, TEMUAN AUDIT (BPK) DAN LEVERAGE TERHADAP KINERJA PEMERINTAH DAERAH (Studi Empiris Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Riau). *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Riau*, 3(1), 1036–1050.
- Andirfa, M. (2018). *Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah* (Maryana & Bo. Rahman (eds.); Maryana da). UIMAL PRESS.
- Ardelia, I. N., Wulandari, H. K., & Dumadi. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal, Dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JAA*, 7(1).
- Aristy, T., Achyani, F., Surakarta, U. M., & Surakarta, U. M. (2019). PEMERINTAH DAERAH ( Studi Empiris Pada Kabupaten / Kota di Jawa Tengah ). *SANCALL*, 2(2), 710–721.
- Azhar, I. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH KOTA LANGSA. *Tranformasi Administrasi*, 11(2), 164–174.
- Baldric, S. (2017). *Akuntansi Sektor Publik (Akuntansi Keuangan Pemrintah Daerah Berbasis Akrual)*. UPP STIM YKPN.
- Dewata, E., Ilmiyyah, N. ., & Sarikadarwati. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 - 2015. *Jurnal Akuntansi Ekonomi Dan Manajemen BIsnis*, 5(1), 147–162.
- Fatmawati, A. P., & Pratiwi, D. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Cimahi. *Jurnal Akuntansi*, 2(2).
- Ferdiansyah, I., Deviyanti, D. R., & Pattisahusiwa, S. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Perimbangan Terhadap Belanja Modal. *JEB Unmul Inovasi*, 14(1), 44–52.
- Fernandes, J., & Putri, S. (2022). *Pengaruh pendapatan asli daerah dan belanja modal terhadap kinerja keuangan daerah pada 19 kabupaten/kota provinsi sumatera barat tahun 2017-2020*. 3(1), 198–209.
- Fitasari, P. N., & Ismawati, K. (2020). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Ekonomi*

*Bisnis Dan Kewirausahaan*, IX(1), 33–46.

- Fuad, K. (2017). Model Alokasi Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Untuk Kemaslahatan Ummat. *Jurnal Akuntansi Indonesia*, 6(1), 41. <https://doi.org/10.30659/jai.6.1.41-62>
- Ghozali, I. (2018). *Analisis Aplikasi Multivariate dengan Program IBM SPSS 25*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hardani. (2020). *METODE PENELITIAN KUALITATIF DAN KUANTITATIF* (H. Abadi (ed.); 1st ed.). CV. Pustaka Ilmu.
- Hardi, N. S. (2019). Pengaruh Belanja Modal terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Langsa. *Samudra Ekonomika*, 3(1), 9–18.
- Heryanti, C. D., Wahidahwati, W., & Suryono, B. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Analisa Akuntansi Dan Perpajakan*, 3(1), 98–117. <https://doi.org/10.25139/jaap.v3i1.1721>
- Ihsan, R. (2022). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, PENDAPATAN TRANSFER, DAN BELANJA MODAL TERHADAP KINERJA KEUANGAN DAERAH. *Accounting Jurnal Asdaf*, 1(1), 1–9.
- Indrawati Putri, N., & Darmayanti, A. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sabragita Povinsi Bali. *E - Jurnal Manajemen*, 8(5), 2834–2861.
- Istiza, D., Feblin, A., & Yulitiawati. (2021). PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN, TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH. *ETAP*, 2(13), 47–61.
- Jefri, R. (2018). Teori Stewardship dan Good Governance. *Jurnal Riset*, 4(03).
- Kadek, N., & Indrawati, N. (2019). Pengaruh PAD dan Dana Perimbangan Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Sabragita Povinsi Bali. *E-Jurnal Manajemen*, 8(5), 2834–2861.
- Keizia, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Investasi Daerah, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara. *Economy and Business*, 1(4).
- Latifa, H., & Haryanto. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Belanja

Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Tengah. *Diponegoro Journal Of Accounting*, 8(2), 1.

Leki, Y. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pada Pemerintah Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 18(5), 164–174.

Martantri, N. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Pertumbuhan Ekonomi, Dan Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *FE UII*, 1(4).

Maulina, A., Alkamal, M., & Salsa Fahira, N. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Ukuran Pemerintah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JISAMAR*, 5(2). <https://doi.org/10.52362/jisamar.v5i2>

Mulyani, S., & Wibowo, H. (2017). Pengaruh Belanja Modal, Ukuran Pemerintah Daerah, Intergovernmental revenue Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Kinerja Keuangan (Kabupaten/ Kota Di Provinsi Jawa Tengah, Tahun 2012-2015). *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 15(1), 57–66.

Nastiti, A. R. (2018). *JURNAL PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA PERIMBANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI KABUPATEN (1)*.

Novia, R., & Kartim. (2019). Pengaruh Size, Wealth, Leverage, Dan Intergovernmental Revenue Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Provinsi Papua. *Accounting Jurnal Universitas YAPIS Papua*, 1(1).

Nugroho, P. (2018). *Pengaruh Karakteristik Pemerintah Daerah, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan*.

Permata Sari, D., & Mustanda, K. (2019). PENGARUH UKURAN PEMERINTAH DAERAH, PENDAPATAN ASLI PEMERINTAH DAERAH Ni Made Diah Permata Sari 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana ( Unud ), Bali , Indonesia PENDAHULUAN. *E-Journal Manajemen*, 8(8), 4759–4787.

Prastiwi, N. D., & Aji, A. W. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Dana Keistimewaan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Kajian Bisnis Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha*, 28(1), 89–105. <https://doi.org/10.32477/jkb.v28i1.45>

Purwanti, E., & Noviyanti, E. (2021). ANALISIS KINERJA KEUANGAN DAERAH PEMERINTAH KOTA SALATIGA TAHUN 2014-2018. *Jurnal Among Makarti*, 14(2), 1–12.

- Putri, S. T. (2021). Pengaruh Leverage, Dana Perimbangan, Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 10(9).
- Salsabilla, S., & Rahayu, S. (2021). PENGARUH WEALTH , LEVERAGE DAN BELANJA DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH ( Studi Kasus pada Pemerintah Provinsi di Indonesia Tahun 2019 ) THE EFFECT OF WEALTH , LEVERAGE AND REGIONAL EXPENDITURE ON REGIONAL FINANCIAL PERFORMANCE ( Case St. *E-Proceeding of Management*, 8(6), 8479–8487.
- Santosa, A. B., & Rofiq, M. A. (2013). dapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) (Studi Kasus Di Provinsi Jawa Barat , Jawa Tengah dan Jawa Timur Periode Tahun 2007 – 2010). *Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBE)*, 20(2), 184–198.
- Saraswati, D., & Rioni, Y. S. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Ukuran pemerintah Daerah, Leverage Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Akuntansi*, 9(2), 110–120.
- Sari, B. I., & Halmawati. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 1–11.
- Sari, I. P. (2019). Pengaruh Ukuran Pemerintah Daerah, PAD, Leverage, Dana Perimbangan Dan Ukuran Legislatif Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah. *JOMFekom*, 4(1), 843–857. <https://media.neliti.com/media/publications/125589-ID-analisis-dampak-pemekaran-daerah-ditinja.pdf>
- Sihombing, P. R. (2021). *Analisis Regresi Data Panel*. Wdina.
- Siska, Y. D., Fetrisia, S., & Maison, W. (2020). Pengaruh Kekayaan Daerah, Dana Perimbangan, dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. *Jurnal Ekonomia*, 11(1), 10–19.
- Sundari, N., & Indra Arza, F. (2019). PENGARUH FAKTOR KEUANGAN DAN FAKTOR NON KEUANGAN TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH DI INDONESIA. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 3(1), 218–232.
- Wahyudin, I., & Hastuti. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan Dan Belanja Modal Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Dan Kota Di Provinsi Jawa Barat. *Indonesian Accounting*

*Research Journal*, 1(1), 86–97. <https://jurnal.polban.ac.id/ojs-3.1.2/iarj/article/view/2364>

Wiraswasta, F., Pud, Jihardjo, & Mahardika, P. (2018). Pengaruh Dana Perimabang dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) TERhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (2009 - 2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 170–180.

Zelmiyanti, R. (2016). Pendekatan Teori Keagenan Pada Kinerja Keuangan Daerah Dan Belanja Modal (Studi Kasus Pada Provinsi Di Indonesia). *JRAK*, 7(1), 11–21.